

Daftar Pustaka

- Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978
- A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1992
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2004,
- _____, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993,
- _____, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Bomer Pasaribu, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, PT. Bhineka Prawira, Jakarta, 1990
- Deddy Supriandy Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Hesti Puspitosari dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, setara Pers, 2011
- Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. 2004
- Irawan Soedjito *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. . 2005
- Irzan Tanjung dalam Yazar Anwar, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, P.T Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990
- Jamal Wiwoho, dan Lulik Djatikumoro. *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aitya Bakti. Bandung. 2004
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantanagn Global*, cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

- Koesoemahatmadja dalam Laica Marzuki, *Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007
- Muhammad Fauzan , *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Darerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta. 2008
- MPR RI, “*Panduan dalam Memasyarakatakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2003
- Ni'matul Huda , *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Jogyakarta, 2011
- Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, cetakan pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2006
- Rochmat Soemirto dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakn 1*, edisi kedua, cetakan pertama, PT Refika Aditama, 2004
- R.Santoso Brotodiharji, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 1987
- Sadjijono, *Memahami Bab. Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Laksbang Persindo, 2008
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2006
- Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1992
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- S. Munawir, *Pepajakan*, edisi keempat, cetaka pertama, Liberty, Yogyakarta, 1992
- _____, *pokok-pokok perpajakan*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2001

Y. Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002

Hasil Wawancara :

Wawancara Bapak Mudzakir Kabid Pembiayaan Pengelolaan Aset Daerah 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Bapak Syawaludin pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Ibu Rochmi, pada tanggal 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Ibu sawitri danik kasi pembukuan dan pelaporan pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Undang-Undang :

Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 Tentang Ombudsman

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturab Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

Halaman Internet :

<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html>,

www.boyolalikab.go.id

<http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/asas-asas-hukum-pajak.html>.

<http://www.linggakab.go.id/pemerintahan/dinas/dppkad>

